

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program Kotaku juga mempunyai fungsi untuk melanjutkan dua program sebelumnya yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat (Kotaku.pu.go.id). Melalui program Kotaku pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran dana ke masyarakat untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pada program P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan, pemerintah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang disebut dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) dimana masyarakat miskin akan memperoleh akses berupa pinjaman bersifat mikro dengan administratif dan persyaratan yang sederhana sehingga mereka dapat meningkatkan kondisi ekonominya secara mandiri. Dana BLM juga digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin (pnpm-mandiri.org).

Program selanjutnya yaitu Kotaku menyalurkan dana bantuan yang disebut Dana Bantuan Investasi (BDI). Dana BDI sendiri adalah dukungan dari pemerintah melalui program Kotaku untuk peningkatan kualitas infrastruktur di kelurahan / desa (Kotaku.pu.go.id). Tujuan dari diberikannya dana BDI ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Besaran dana BDI untuk setiap kelurahan / desa setinggi – tingginya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Direktoran Jendral Cipta Karya, 2016).

Dana bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut selanjutnya akan diterima dan dikelola Badan Keswadayaan Masyarakat / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) yang merupakan lembaga pimpinan kolektif oragnisasi masyarakat yang terdiri atas pribadi yang dipercaya masyarakat berdasarkan kriteria nilai – nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan (Kotaku.pu.go.id). Dana yang telah diterima oleh BKM / LKM akan disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu visi, misi, dan kebutuhan yang sama sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama (pnpm-mandiri.org). Dengan kata lain secara tidak langsung BKM / LKM menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat (KSM).

Pengelolaan Dana BLM dan BDI harus dipertanggungjawabkan oleh BKM kepada masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dengan menyusun laporan keuangan. Mengingat banyaknya dana BLM dan BDI yang dikelola oleh

BKM maka penyusunan laporan keuangannya harus disertai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal yang baik. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi / tugas yang telah diembannya. Sedangkan transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik (Dirjen Cipta Karya, 2012A). Sedangkan pengendalian internal dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk menjaga dan mengamankan aset suatu organisasi (Hery,2015). BKM harus senantiasa menerapkan akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal karena hal ini merupakan salah satu kunci keberlanjutan BKM dalam rangka membangun kepercayaan dari masyarakat. BKM harus berupaya untuk membangun kepercayaan agar dapat menjadi motor penggerak untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di desa atau kelurahan .

Akuntabilitas laporan keuangan dapat dipenuhi dengan beberapa kriteria. Kriteria akuntabilitas laporan keuangan pada buku pedoman program Kotaku yaitu: (1) Seluruh laporan keuangan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program Kotaku. (2) Penerbitan laporan keuangan harus tepat waktu. BKM harus menerbitkan laporan keuangan setiap bulan dan paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Adanya pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun BKM harus diaudit oleh BKM harus diaudit oleh auditor eksternal.

Transparansi laporan keuangan BKM juga sudah diatur dalam program Kotaku. Ada beberapa aturan tentang transparansi laporan keuangan pada program Kotaku. BKM harus mempertanggung jawabkan laporan keuangannya kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). RWT merupakan forum pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan tertinggi yang ada di BKM. Selain RWT, BKM juga harus menyebarluaskan laporan keuangannya pada papan informasi yang berada pada lima titik yang berbeda supaya dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu bila ada kegiatan pembangunan infrastruktur BKM harus memasang papan informasi di tempat kegiatan infrastruktur tersebut supaya masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kegiatan infrastruktur tersebut.

Suatu hal yang tidak kalah penting dari akuntabilitas dan transparansi adalah pengendalian internal. BKM harus mampu menerapkan pengendalian internal yang baik pada laporan keuangannya agar seluruh kegiatan BKM dapat berjalan dengan baik dan tidak ada tindakan penyelewengan dana yang terjadi. Ada beberapa prosedur pengendalian internal pada laporan keuangan BKM yang diatur dalam program Kotaku. BKM wajib melakukan pengamanan rekening bank yang dimilikinya. Selain itu BKM juga harus menjalankan prosedur penandatanganan bukti transaksi. Dan yang terakhir BKM harus bisa melakukan pengelolaan uang kasnya dengan baik.

Kenyataan dilapangan masih banyak BKM yang tidak dapat menerapkan prinsip akuntabilitas ,transparansi, dan melakukan pengendalian internal pada laporan keuangannya dengan baik. Hal ini disebabkan masih adanya pemikiran bahwa para pengurus BKM hanya seorang relawan yang bahkan tidak dibayar dan mereka juga harus membagi waktu dengan aktivitas mereka sehari – hari sehingga

mereka tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan semestinya (Fidiana dan Ngumar, 2018). Kurangnya pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan juga menyebabkan penyusunan laporan keuangan pada BKM sebagai bentuk pertanggungjawaban masih banyak kekurangan. Para pelaku BKM masih sangat bergantung kepada Fasilitator kelurahan (FASKEK) untuk membuat laporan keuangannya (Sucipto, 2012).

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang tidak diterapkan dengan baik akan menyebabkan kegiatan yang dilakukan oleh BKM tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu masalah yang sering terjadi pada BKM yaitu banyaknya pembayaran pinjaman dana bergulir yang mengalami kemacetan. Bukan hanya itu, penyelewengan Dana BLM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara pembuatan KSM fiktif juga kerap terjadi (Fidiana dan Ngumar, 2018). Penyaluran Dana BDI dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur juga butuh banyak perhatian khusus dikarenakan Dana BDI akan dikelola secara mandiri oleh KSM. Jika pengendalian internal pada kegiatan pembangunan infrastruktur lemah, bukan tidak mungkin akan bisa terjadi penyelewengan Dana BDI oleh KSM pada kegiatan pembangunan infrastruktur.

Beberapa penelitian dengan menggunakan BKM sebagai obyek penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Fidiana dan Ngumar (2018) yang meneliti tentang penerapan akuntabilitas pada BKM. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa laporan keuangan BKM masih sering terlambat diterbitkan, hal ini disebabkan tingkat kehadiran atau partisipasi pengurus BKM sangat rendah karena sifat sukarelawan yang melekat pada pengurus BKM. Selain itu kompetensi pengurus BKM dalam menyusun laporan keuangan juga sangat rendah, hal ini

dikarenakan pengurus BKM dipilih karena status mereka sebagai tokoh masyarakat.

Penelitian lainnya yang menggunakan BKM sebagai obyek penelitian dilakukan oleh Yulianti, Dkk (2015) juga meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada BKM. Pada penelitian ini diketahui bahwa kesibukan pengurus BKM diluar tugasnya membuat laporan keuangan BKM sering terlambat terbit. Selain itu kemampuan pengurus BKM dalam menggunakan komputer yang masih sangat minim juga menjadi faktor penyebab keterlambatan penerbitan laporan keuangan BKM.

Penelitian dengan obyek BKM kebanyakan hanya membahas tentang akuntabilitas laporan keuangan pada BKM saja. Pembahasan mengenai transparansi dan pengendalian internal masih sangat minim. Padahal transparansi dan pengendalian internal merupakan aspek penting yang harus diterapkan oleh BKM dalam menjalankan kegiatannya. Maka dari itu transparansi dan pengendalian internal pada laporan keuangan BKM masih menarik untuk diteliti saat ini.

Jawa timur merupakan provinsi dengan kota yang menjalankan program Kotaku terbanyak se-Indonesia yaitu berjumlah 36 kota. Kota Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki cukup banyak BKM di Jawa timur yaitu berjumlah 154 BKM. Jumlah aset yang dikelola oleh BKM di seluruh kota Surabaya sebanyak Rp.27.465.403.320,- (Data Korkot Kotaku Surabaya). Pada tahun 2018 kota Surabaya mendapatkan dana BDI sebesar 2 Milyar Rupiah yang disalurkan kepada 12 BKM. Salah satu yang mendapat dana BDI pada tahun 2018 yaitu BKM "X". BKM tersebut menerima dana BDI sebesar Rp. 134.500.000,-. BKM "X" juga salah satu BKM yang memiliki aset terbanyak di Surabaya yaitu

Rp.1.028.243.293,- pada akhir 2018. Penelitian ini akan mencoba menganalisis penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal pada laporan keuangan BKM “X”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal pada Laporan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat “X”)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada laporan keuangan BKM “X” ?
- 2 Bagaimana hambatan yang dihadapi BKM “X” dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada laporan keuangannya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui tentang penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada Laporan Keuangan BKM “X”.
- 2 Untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi oleh BKM “X” dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada laporan keuangannya.

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Pembahasan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada penelitian ini mengacu dan dibatasi pada POS pengelolaan keuangan skala lingkungan program Kotaku (Dirjen Cipta Karya, 2016A).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Manajemen Sektor Publik terutama pada bidang akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada lembaga sektor publik yang dalam penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi para pengurus BKM tentang pentingnya penerapan akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal pada laporan keuangan dalam mengelolah BKM agar tidak ada penyelewengan dana dan masalah lain yang terjadi dalam kegiatan BKM.